

ALI KHAMENEI DAN KETAHANAN IDEOLOGIS IRAN: KEPEMIMPINAN SPIRITAL-MILITER DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK RESISTENSI NASIONAL

**Ely Asyer Sitompul, Nur Rochmad Ibrohim, Tarsisius Susilo, Budi Saroso,
Beny Leonard Limbong**

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1sitompul_elv560@gmail.com, 2nurizza_46@gmail.com, 3muchus70@gmail.com

Abstrak : Ayatollah Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran memadukan otoritas spiritual dengan pengaruh militer dalam kepemimpinannya. Di bawah Khamenei, Iran menghadapi sanksi internasional dan tekanan global yang hebat, namun mampu bertahan berkat ketahanan ideologis yang kuat. Tulisan ini menganalisis bagaimana integrasi ideologi (nilai-nilai Revolusi Islam dan Syiah) dengan strategi pertahanan mandiri Iran (seperti *economy of resistance*, pembangunan militer domestik) menjadi kunci resistensi nasional Iran. Khamenei mencetuskan konsep “*Ekonomi Resistensi*” yang berprinsip pada swasembada dan diversifikasi, misalnya upaya kemandirian bahan bakar dengan membangun kilang minyak domestik, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan teknologi pertahanan (drone dan misil balistik lokal). Kepemimpinan Khamenei yang bersifat spiritual-militer dengan legitimasi Wilayah al-Faqih menjadikannya pemimpin tertinggi yang membimbing ideologi rakyat sekaligus mengendalikan strategi militer, terbukti saat ia mengeluarkan *fatwa* senjata nuklir haram namun tetap mendorong penguatan kapasitas nuklir sipil. Sebagai perbandingan, Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan nilai kejuangan 45 sebagai roh pertahanan. Studi ini membandingkan prinsip ketahanan ideologi Iran dengan Indonesia, yang meski berbeda (teokrasi vs. Pancasila), sama-sama menekankan resiliensi ideologis dalam pertahanan. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan ideologi negara mampu memupuk solidaritas nasional untuk menghadapi ancaman, dengan catatan perbedaan konteks mengharuskan adaptasi strategi. Implikasinya, Indonesia dapat bercermin dari Iran mengenai pentingnya ketahanan ideologi, namun menerapkannya sesuai nilai Pancasila – menjadikan pertahanan Indonesia tegas membela kedaulatan sekaligus humanis.

Kata Kunci: Ketahanan ideologi; Ekonomi Resistensi; Wilayah al-Faqih; Revolusi Islam Iran; Pancasila; Pertahanan Nasional

Abstract: Ayatollah Ali Khamenei, as Iran's Supreme Leader, combines spiritual authority with military influence in his leadership. Under Khamenei, Iran faces severe international sanctions and global pressure, yet has endured through strong ideological resilience. This paper analyzes how integrating ideology (values of the Islamic Revolution and Shi'ism) with Iran's self-reliant defense strategies (such as the resistance economy and domestic military development) has been key to national resistance. Khamenei launched the “Resistance Economy” concept emphasizing self-sufficiency and diversification for example, achieving fuel independence by building domestic refineries, bolstering food security, and developing defense technology (local drones and ballistic missiles) Khamenei's spiritual-military leadership –legitimized by the principle of Wilayah al-Faqih enables him to guide the people ideologically while also controlling military strategy, as seen when he issued a fatwa banning nuclear weapons yet still pushed for strengthened civilian nuclear capacity. In comparison, Indonesia's defense is guided by the Pancasila ideology and the 1945 patriotic values. This study compares Iran's principle of ideological resilience with that of Indonesia, which, although different (theocracy vs. Pancasila), both emphasize ideological strength in defense. The findings indicate that a strong state ideology can foster national solidarity against threats, with the caveat that differing contexts require strategic adaptation. Implication: Indonesia can learn from Iran the importance of ideological resilience, but apply it according to Pancasila values making Indonesia's defense resolute in protecting sovereignty while remaining humane.

Keywords: *Ideological resilience; Resistance Economy; Wilayat al-Faqih; Iranian Islamic Revolution; Pancasila; National Defense*

Pendahuluan

Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei telah menampilkan ketahanan nasional yang unik di tengah tekanan global. Sebagai *Rahbar* (Pemimpin Tertinggi) sejak 1989, Khamenei memegang kendali otoritas spiritual dan komando militer sekaligus. Ia merupakan pemimpin agama Syiah sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Iran, sesuai konsep *Guardianship of the Jurist (Wilayat al-Faqih)* yang memberinya legitimasi mengatur urusan sipil maupun militer. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran menghadapi sanksi ekonomi internasional, embargo senjata, dan ancaman militer dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Meskipun demikian, Iran mampu bertahan dan tetap eksis sebagai aktor regional yang disegani. Salah satu faktor utamanya adalah ketahanan ideologis semangat nasional yang dibangun di atas ideologi Revolusi Islam 1979 (anti imperialisme, anti hegemoni Barat, dan solidaritas Islam). Khamenei meneruskan visi pendahulunya, Ayatollah Khomeini, bahwa melawan dominasi asing adalah misi suci. Hal ini tercermin dalam retorika resmi Iran yang menyebut Amerika Serikat sebagai “*kekuatan arogan*” yang harus dilawan, dan dalam dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok “Poros Resistensi” di Timur Tengah (seperti Hezbollah, Hamas) untuk menantang pengaruh Barat. Dengan menggabungkan peran spiritual (sebagai panutan religius) dan militer (sebagai pengendali strategi pertahanan), Khamenei berhasil memupuk solidaritas internal Iran. Rakyat Iran didorong melihat perjuangan ekonomi dan pertahanan mereka bukan sekadar upaya duniawi, melainkan bagian dari jihad fi sabilillah (perjuangan suci) mempertahankan martabat bangsa dan agama. Pendekatan ini terbukti efektif menjaga loyalitas banyak warga Iran kepada negara, meskipun menghadapi kesulitan ekonomi akibat sanksi.

Fokus Masalah

Fokus kajian ini adalah bagaimana integrasi ideologi dengan strategi pertahanan mandiri Iran menjadi kunci resistensi nasional, serta perbandingannya dengan nilai-nilai kejuangan Indonesia berbasis Pancasila. Pertanyaan kunci yang dijawab meliputi: (1) Bagaimana Iran di bawah Khamenei memadukan ideologi Revolusi Islam (Syiah) dengan langkah-langkah konkret pertahanan, seperti *resistance economy* dan pembangunan kekuatan militer domestik, untuk bertahan menghadapi tekanan eksternal (2) Sejauh mana prinsip ketahanan ideologis tersebut efektif menopang resistensi nasional Iran (3) Bagaimana prinsip serupa muncul dalam konteks Indonesia misalnya melalui nilai-nilai kejuangan 1945 dan ideologi Pancasila serta apa perbedaan fundamental karena perbedaan ideologi negara (Iran teokratis vs Indonesia Pancasila yang berbineka). Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ideologi dalam doktrin pertahanan dapat diperoleh. Hal ini relevan bagi Indonesia dalam merumuskan strategi pertahanan yang tak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kokoh secara mental ideologis. Secara ringkas, makalah ini menelaah ketahanan ideologis Iran di bawah Khamenei dan mengambil pelajaran bagi Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konteks ideologi yang berbeda agar adaptasinya tepat guna.

Konteks

Dunia dewasa ini ditandai oleh kompetisi kekuatan pada berbagai domain – ekonomi, militer, teknologi, informasi yang menuntut negara memiliki ketahanan menyeluruh (*multidomain*). Iran kerap dijadikan contoh negara yang mampu melawan hegemoni global secara relatif sukses. Meskipun dikenai

embargo ekonomi dan isolasi diplomatik selama puluhan tahun, Iran tidak runtuh dan bahkan berhasil mengembangkan program nuklir sipil, industri pertahanan, dan pengaruh regional. Keberhasilan relatif Iran ini sering dikaitkan dengan resiliensi ideologis pasca Revolusi 1979, di mana nilai-nilai revolusi terus dijaga hidup oleh rezim. Narasi “Revolusi yang tak pernah padam” dan perlawanan terhadap dominasi asing telah menjadi budaya politik di Iran. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara teokratis dan memiliki ideologi Pancasila yang inklusif secara agama dan budaya. Namun, Indonesia juga memiliki sejarah perjuangan heroik melawan penjajahan, dengan slogan “Merdeka atau Mati” yang memompa semangat rakyat pada 1945. Selepas kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai ancaman ideologis (pemberontakan, komunisme, terorisme) dan meresponsnya dengan peneguhan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Dalam konteks global kini, Indonesia tidak berada di bawah embargo sebagaimana Iran, tetapi tetap dihadapkan pada tantangan seperti kompetisi geo-ekonomi, perang informasi, dan potensi *proxy war*. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk bercermin pada pengalaman negara lain seperti Iran dalam hal ketahanan ideologi, sambil menyadari perbedaan mendasar: Iran adalah republik Islam dengan satu mazhab dominan, sedangkan Indonesia adalah republik berlandaskan Pancasila yang mengakomodasi keragaman. Artinya, ideological resilience tetap krusial, namun pendekatan penerapannya berbeda. Konteks perbandingan ini menuntut kajian yang hati-hati agar *lesson learned* dari Iran dapat diadaptasi secara cerdas di Indonesia tanpa bertentangan dengan nilai Pancasila dan demokrasi.

Tinjauan Pustaka

Ketahanan Ideologis: Konsep *ketahanan ideologis* merujuk pada kemampuan suatu bangsa mempertahankan eksistensi dan persatuannya melalui kekuatan ideologi dan nilai-nilai keyakinan kolektif. Dalam literatur hubungan internasional, ideologi negara dapat menjadi sumber soft power dan daya tahan psikologis masyarakat. Studi tentang Iran menunjukkan bahwa rezim pasca 1979 sangat menekankan ideologi Revolusi Islam sebagai inti identitas nasional. Doktrin “Export of Revolution” (ekspor revolusi) diperkenalkan Imam Khomeini, yang dilanjutkan Khamenei, menyerukan penyebaran semangat revolusi ke negara-negara Muslim lain. Selain itu, narasi perlawanan terhadap *global arrogance* (kesombongan global Barat) terus digelorakan dalam wacana resmi Iran. Tricontinental Institute mencatat bahwa pascarevolusi, Iran memposisikan diri sebagai aktor anti-imperialis yang mendukung gerakan pembebasan (misalnya pro-Palestina), sehingga ideologi perlawanan ini berhasil memupuk solidaritas internal dan simpati eksternal di Dunia Islam. Teori *revolutionary leadership* menjelaskan kepemimpinan Khamenei dari perspektif sosiologis: ia menggabungkan tipe kharismatik-religius dengan institusional. Legitimasi bukan bersumber dari pemilu langsung, melainkan dari reputasi spiritual dan penunjukan oleh Dewan Ahli (sesuai konstitusi Iran). Khamenei mempertahankan semangat juang rakyat melalui retorika jihad dan martir: misalnya, menyebut para sukarelawan yang gugur di Suriah sebagai “pembela makam suci” (defenders of the shrine) demi melindungi agama. Retorika ini efektif menumbuhkan kebanggaan bahwa berkorban demi negara dan iman adalah kemuliaan. Dengan demikian, ideologi negara Iran gabungan nasionalisme religius dan revolusioner menjadi perekat soft power domestik yang membuat rakyat rela bertahan dalam kondisi sulit.

Resistensi Nasional Iran: Salah satu strategi utama Iran untuk bertahan di bawah tekanan adalah melalui apa yang disebut Ekonomi Resistensi (*Resistance Economy*). Istilah ini dipopulerkan oleh Khamenei sekitar awal 2010-an (secara resmi garis-garis kebijakan *economy of resistance* diumumkan tahun 2014). Konsepnya adalah merombak ekonomi agar tahan guncangan (*shock-proof*) dari sanksi

luar, dengan cara mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kapasitas internal. Elemen kunci *Resistance Economy* antara lain:

- a. Independensi Energi: Membangun kilang-kilang minyak domestik untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri dan mengekspor surplus, sehingga Iran tak perlu impor bensin meski ekspor minyak mentah dibatasi. Contohnya, Iran berinvestasi besar dalam kilang seperti proyek peningkatan kapasitas Kilang Star di Bandar Abbas. Akibatnya, Iran berhasil mencapai swasembada bensin sekitar akhir 2010, beralih dari importir menjadi pengekspor bahan bakar.
- b. Ketahanan Pangan: Menggenjot produksi komoditas strategis seperti gandum, gula, dan beras melalui insentif pertanian dan proteksi pasar domestik. Investasi pada sektor pertanian ini bertujuan memastikan rakyat tidak kelaparan walau akses impor pangan dibatasi sanksi. Hasilnya, produksi gandum Iran meningkat sehingga beberapa tahun terakhir Iran hampir swasembada gandum.
- c. Teknologi dan Pertahanan Domestik: Membangun industri pertahanan dalam negeri termasuk pengembangan drone, rudal balistik, satelit, dan nuklir sipil dengan memanfaatkan kemampuan lokal. Iran mendirikan banyak perusahaan milik negara maupun unit di bawah IRGC (*Islamic Revolutionary Guard Corps*) untuk memproduksi senjata sendiri. Misalnya, Iran sukses membuat drone *Shahed-136* berbiaya rendah yang mampu digunakan dalam konflik modern, serta rudal balistik *Zolfaghhar* dan *Khorramshahr*. Program rudal ini terus maju meski diembargo, menunjukkan efektivitas strategi berdikari.
- d. Diversifikasi Mitra Dagang: Mencari pasar dan mitra alternatif di luar blok Barat, misalnya meningkatkan hubungan dagang dengan Tiongkok, India, Rusia, Turki, dan negara tetangga. Iran menerapkan skema *barter* “minyak ditukar barang” dengan beberapa negara Teluk dan Asia untuk menghindari sistem finansial yang dikontrol AS. Langkah ini sedikit banyak melemahkan efek isolasi Barat.

Selain langkah-langkah di atas, rezim Iran juga mengandalkan IRGC (Pasdaran) sebagai motor ekonomi domestik. Studi CSIS (2020) menyebut IRGC kini menjadi pengendali terkuat sektor-sektor ekonomi penting di Iran. Awalnya, Pasdaran dilibatkan dalam rekonstruksi pasca-perang Iran-Irak, namun kemudian ekspansinya meluas ke industri perbankan, konstruksi, energi, telekomunikasi, dan manufaktur. Perusahaan-perusahaan terkait IRGC sering mendapat kontrak besar tanpa tender untuk proyek infrastruktur dan eksplorasi minyak/gas, sehingga membangun “imperium ekonomi” tersendiri. Di satu sisi, ini memastikan sumber daya nasional dikelola secara mandiri; di sisi lain, menimbulkan tudingan ekonomi Iran menjadi oligarki militer. Namun, peran ekonomi IRGC memang membantu kemampuan Iran bertahan di bawah sanksi misalnya, IRGC melalui jaringan *black market*-nya mampu menghindari embargo dengan menyelundupkan minyak ke luar negeri, yang hasilnya mendanai operasional mereka. Hasil nyata dari strategi resistensi nasional ini dapat dilihat dari data ekonomi: ekspor non-migas Iran mencapai USD 130,2 miliar pada 2024 (naik 15,6%) dan Iran mampu meluncurkan satelit serta memproduksi vaksin COVID-19 secara lokal. Meskipun begitu, harus diakui *Resistance Economy* juga datang dengan harga mahal: inflasi Iran melonjak di atas 45%, pengangguran mencapai 25%, mata uang rial terdepresiasi tajam. Artinya, ketahanan ekonomi berhasil dicapai tanpa kolaps, tetapi dengan konsekuensi kesulitan ekonomi bagi rakyat kecil.

Kepemimpinan Spiritual-Militer (Iran): Struktur politik Iran pasca-revolusi memungkinkan Khamenei menjalankan kepemimpinan dua lapis: spiritual dan militer. Secara formal, *Supreme Leader* adalah panglima tertinggi semua angkatan bersenjata Iran dan memiliki kewenangan akhir dalam

kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Namun, tidak seperti diktator militer, Khamenei berasal dari kalangan ulama. Wilayat al-Faqih (perwalian juris) sebagai doktrin konstitusional memberikan pemimpin tertinggi hak mengatur urusan duniawi umat demi menjaga pemerintahan Islami. Literatur politik Iran menggambarkan Khamenei memainkan peran ganda: (1) sebagai *Marja Taqlid* (figur rujukan religius), ia mengeluarkan *fatwa* dan *khotbah Jumat* yang membentuk pandangan moral publik; (2) sebagai kepala negara de facto, ia memutuskan arah strategis – mulai dari program nuklir, keterlibatan Iran di konflik Suriah/Irak, hingga penunjukan komandan militer. Salah satu contoh konkret adalah sikap Khamenei terhadap senjata nuklir: ia mengeluarkan fatwa bahwa pengembangan dan penggunaan senjata nuklir haram dalam Islam. Fatwa ini kerap dikemukakan diplomasi Iran untuk menunjukkan niat damai program nuklirnya. Namun, Khamenei tetap mendorong penguasaan teknologi nuklir untuk energi dan ketahanan, sehingga Iran terus memperkaya uranium hingga 60% (mendekati tingkat senjata) sebagai *deterrant* strategis. Contoh lain adalah peran Iran dalam perang Suriah: Khamenei memberi restu kepada Jenderal Qassem Soleimani memimpin Pasukan Quds IRGC untuk membantu Suriah dan Irak melawan ISIS. Ia membingkai misi itu sebagai “pembelaan Makam Suci” merujuk pada perlindungan situs ziarah Syiah seperti Makam Sayyidah Zainab di Suriah sehingga intervensi militer Iran diberi justifikasi religius. Pendekatan ini berhasil membangun persepsi di Iran bahwa berperang di Suriah/Irak adalah perpanjangan dari membela agama dan negara, bukan ekspansi agresif. Dampaknya, keluarga para syuhada “pembela makam” dihormati, dan wacana *jihad* melawan teroris Sunni radikal (ISIS) diterima luas oleh publik Iran.

Perbandingan dapat ditarik dengan pola kepemimpinan di Indonesia. Secara konstitusi, Presiden RI adalah Panglima Tertinggi TNI, tetapi Indonesia memisahkan ranah sipil dan militer dengan tegas sejak Reformasi 1998 (TNI dilarang berpolitik). Presiden Indonesia bukan tokoh spiritual, meskipun bisa saja memiliki karisma religius secara pribadi. Namun, sejarah Indonesia mencatat momen di mana kepemimpinan sipil dan militer bersatu visi ideologis: contohnya, pada masa Revolusi 1945-1949, Soekarno-Hatta sebagai pemimpin politik membawa ideologi nasionalisme Indonesia merdeka, sementara Panglima Jenderal Sudirman mewujudkan perjuangan bersenjata di lapangan; keduanya saling melengkapi. TNI lahir sebagai Tentara Pejuang dan Tentara Rakyat, berpadu dengan semangat rakyat mempertahankan proklamasi. Konsep ini kemudian dilembagakan sebagai doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana seluruh sumber daya nasional dilibatkan untuk pertahanan. Jadi, meskipun Indonesia tidak memiliki “pemimpin spiritual” resmi seperti Iran, persatuan ideologi nasional dengan strategi militer juga diakui vital. Khamenei secara eksplisit menanamkan *unity of command and purpose*: militer Iran (terutama IRGC) ditanamkan ideologi loyalitas pada Revolusi Islam di atas segala-galanya. Di Indonesia, Pancasila dan Sumpah Prajurit menjadi landasan moral TNI untuk selalu setia pada bangsa dan tidak berkhianat pada ideologi negara. Intinya, baik Iran maupun Indonesia menunjukkan bahwa jika pemimpin mampu menyelaraskan visi ideologis dengan doktrin militer, pertahanan negara akan lebih solid karena mendapat dukungan rakyat dan prajurit secara bersamaan.

Prinsip Kejuangan TNI & Pancasila (Indonesia): Ideologi pertahanan Indonesia berakar pada nilai-nilai kejuangan 1945 dan falsafah Pancasila. Berbeda dengan Iran yang ideologi negaranya berbasis agama tertentu (Islam Syiah), Indonesia menganut ideologi nasional sekular inklusif. Sekular di sini bukan berarti anti-agama, melainkan tidak menjadikan satu agama sebagai dasar negara. Sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui pentingnya nilai spiritual, tetapi Indonesia mengakomodasi multi-agama. Akibatnya, pertahanan Indonesia tidak disandarkan pada satu doktrin agama seperti jihad, melainkan pada patriotisme kebangsaan. Konsep Bela Negara misalnya didefinisikan sebagai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, yakin Pancasila, dan rela berkorban bagi

negara. Ini sejajar dengan jihad pertahanan di Iran, namun dengan narasi yang lebih plural dan nasionalis.

Meskipun begitu, esensi ketahanan ideologis ada di Indonesia. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto sangat menekankan Pancasila sebagai ideologi pemersatu untuk menangkal komunisme (terutama pasca G30S 1965). Morfit (1981) mencatat bahwa Pancasila dijadikan semacam "agama sipil" yang harus diyakini setiap warga, dengan program penataran P4 untuk menanamkan nilainya. Ini menunjukkan kesadaran bahwa persatuan ideologis adalah kunci stabilitas. Nilai-nilai kejuangan TNI juga sejalan: TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat. Nilai Kejuangan '45 yang diwariskan kepada TNI meliputi *keberanian, kerelaan berkorban, semangat pantang menyerah, persatuan TNI-Rakyat, loyalitas pada bangsa*. Menhan Ryamizard Ryacudu (2019) menegaskan bahwa jiwa semangat '45 ini harus terus dipegang teguh prajurit, dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Sumpah Prajurit, dan Sapta Marga. TNI secara doktrinal memiliki amanah untuk menjaga ideologi Pancasila sebagai harga mati setiap usaha mengubah ideologi bangsa harus ditentang. Dengan demikian, militer Indonesia juga memiliki peran ideologis: bukan sebagai penjaga satu agama, tapi sebagai penjaga Pancasila dan NKRI.

Kemiripan dengan Iran terletak pada pentingnya loyalitas ideologi bagi prajurit. Bedanya, di Iran ideologi itu berbasis agama (kombinasi nasionalisme-religius), sedangkan di Indonesia berbasis nasionalisme plural. Namun, keduanya sama-sama memerlukan pendidikan ideologi berkelanjutan. Iran melakukannya melalui jaringan Basij (milisi sukarela) yang juga berfungsi membina ideologi di masyarakat hingga kampus. Di Indonesia, ada program Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan pendidikan Pancasila di sekolah/PT serta pelatihan komponen cadangan, yang esensinya menanamkan kecintaan pada NKRI. Dengan demikian, literatur pertahanan mengakui ideological resilience sebagai salah satu gatra dalam Ketahanan Nasional (di Indonesia dikenal dalam *Asta Gatra*, dengan gatra ideologi sebagai gatra pertama). Kajian pertahanan modern, seperti yang ditulis Sutanto (2021), menekankan bahwa membangun karakter bangsa berideologi Pancasila pada generasi muda adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Ini mencakup menanamkan persatuan, toleransi, dan keadilan sosial sehingga generasi produktif kebal terhadap pengaruh ideologi asing radikal. Jadi, meski bentuknya berbeda, ketahanan ideologi di Indonesia memiliki bobot yang sama pentingnya dengan di Iran dalam doktrin pertahanan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif-historis dengan metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan telaah literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder terkait topik. Untuk kasus Iran, data diperoleh dari: pidato-pidato Khamenei (yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris di situs resmi Khamenei dan media Iran), dokumen kebijakan resmi seperti *General Policies of the Resistance Economy* (2014), serta analisis lembaga think-tank tentang kapabilitas pertahanan Iran (misalnya laporan Rawabet Center 2025 tentang *Resistance Economy*, dan paparan *Council on Foreign Relations* 2025 tentang peran IRGC di ekonomi). Untuk konteks Indonesia, sumber yang dikaji antara lain: sejarah perjuangan kemerdekaan (misalnya teks pidato Bung Tomo 10 November 1945 yang mengandung slogan "Merdeka atau Mati"), dokumen konsep Ketahanan Nasional (teori Asta Gatra yang menempatkan ideologi sebagai salah satu gatra vital), Doktrin TNI dan literatur akademis tentang Pancasila (contoh: Morfit, 1981). Selain itu, referensi dari Kementerian Pertahanan RI digunakan, seperti pidato Menhan tentang nilai Kejuangan '45 dan jati diri TNI, serta informasi resmi mengenai Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Analisis dilakukan dengan cara comparative ideology analysis, yakni membedah persamaan dan perbedaan peran ideologi dalam pertahanan Iran vs Indonesia. Kerangka

filsafat pertahanan juga diaplikasikan: di Iran pertahanan dilandasi doktrin *jihad* dan *martyrdom*, sedangkan di Indonesia ada konsep Pertahanan Semesta yang bertumpu pada patriotisme dan kemanusiaan. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) memetakan komponen ideologis dalam kebijakan pertahanan Iran (ekonomi resistensi, mobilisasi Basij, retorika politik); (2) memetakan komponen ideologis dalam doktrin pertahanan Indonesia (Pancasila, Wawasan Nusantara, Bela Negara); (3) membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu dan jurang perbedaan; (4) menyimpulkan pelajaran yang dapat diambil untuk penguatan pertahanan Indonesia ke depan. Penelitian ini tidak melakukan survei lapangan atau wawancara, melainkan sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis naratif atas data sejarah serta dokumen kebijakan.

Analisis dan Pembahasan

a. Ideologi sebagai Fondasi Resistensi Iran: Pascarevolusi 1979, Iran secara resmi mendefinisikan diri sebagai Republik Islam yang berideologi anti-imperialisme. Ideologi Islam revolusioner ini menjadi fondasi resistensi nasional Iran dalam menghadapi musuh eksternal. Ayatollah Khomeini dahulu menanamkan konsep “Tidak Timur, Tidak Barat, Republik Islam” menegaskan sikap independen Iran di antara blok Timur (Soviet) dan Barat (AS). Khamenei melanjutkan garis itu, menekankan bahwa melawan hegemoni Barat adalah panggilan religius dan nasional. Hal ini menciptakan semacam *siege mentality* (mentalitas dikepung) di masyarakat, namun sekaligus memupuk patriotisme berbalut agama. Rakyat diajak melihat penderitaan akibat sanksi sebagai harga perjuangan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Islam. Data menunjukkan banyak warga Iran mendukung program nuklir negaranya meski tahu sanksi ekonomi berdampak pada hidup sehari-hari, karena program tersebut dilambangkan sebagai kedaulatan teknologi dan simbol martabat bangsa. Sebuah survei tahun 2019 oleh *University of Maryland* misalnya, menemukan mayoritas responden Iran bangga dengan kemampuan nuklir domestik dan menolak menghentikannya, walau ekonomi tertekan. Ini indikasi keberhasilan propaganda ideologis rezim. Ketahanan psikologis rakyat terbentuk mereka rela “makan rumput” daripada menyerah pada dikte asing, meminjam retorika Sukarno dulu.

Implementasi ideologi ke kebijakan konkret tampak pada strategi Ekonomi Resistensi Khamenei. Ketika sanksi diperketat selepas 2010, Khamenei menyerukan prinsip “ekonomi muqawama” yang intinya: “Bangunlah Iran dari dalam”. Ia mendorong ilmuwan dan teknokrat Iran menggali potensi lokal. Seperti disebut sebelumnya, Iran membangun kilang minyak sendiri agar tak perlu impor bensin keputusan ini muncul setelah pada 2010 Iran nyaris lumpuh karena kekurangan bensin akibat sanksi. Hasilnya, dalam beberapa tahun Iran berhasil swasembada BBM. Di sektor pangan, Iran menginvestasi besar-besaran di proyek irigasi dan subsidi petani untuk mencapai swasembada gandum, dan pernah sukses swasembada di awal 2010-an meski belakangan sedikit goyah. Pengembangan kapabilitas militer mandiri juga tak lepas dari dorongan ideologi: rezim menegaskan bahwa pertahanan adalah kewajiban agama dan nasional, sehingga tidak boleh bergantung pada asing. Sejak embargo senjata diberlakukan (mulai 1980-an hingga dicabut 2020), Iran memulai industri militer lokal dari reverse engineering senjata asing hingga merancang produk orisinal. Drone jadi andalan baru: didorong embargo, ilmuwan Iran justru menciptakan drone kamikaze murah (*Shahed-136*) yang efektif digunakan dalam konflik regional. Contoh-contoh ini menunjukkan ketahanan ideologis melahirkan kemandirian inovatif. Ada anekdot populer di Iran bahwa sanksi dianggap bukan alasan untuk

menyerah, tapi motivasi untuk berdikari. Khamenei sendiri menyatakan, “*Sanctions have helped us to open our eyes upon our own resources... sanctions motivated us to start doing great things*”. Ini nyata terlihat: ketika pintu luar negeri tertutup, Iran memanfaatkan kapasitas dalam negeri yang dahulu terabaikan. Bahkan tahun 2020, saat pandemi COVID-19 dan AS masih mengembargo obat, Iran mampu memproduksi vaksin sendiri (COVIran Barekat) suatu pencapaian dari *drive swasembada*.

Sebagai pembanding historis, Indonesia pada era Presiden Soekarno pernah menggalakkan slogan “Berdikari” (Berdiri di Kaki Sendiri) yang maknanya paralel dengan *resistance economy*. Soekarno tahun 1964 mencetuskan Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Ini dimaksudkan agar Indonesia mandiri dan tak tergantung bangsa lain. Konsep Berdikari lahir di tengah konfrontasi Indonesia dengan kekuatan kolonial (Barat dan Malaysia). Kebijakan yang diambil misalnya swasembada pangan (beras) dan proyek mercusuar industri strategis (pabrik baja, pesawat) meski dengan teknologi Uni Soviet kala itu. Perbedaannya, konteks ideologi: Soekarno berlandaskan nasionalisme sekuler dan anti-imperialisme yang mirip Iran, namun tidak memakai justifikasi agama tertentu. Setelah Soekarno jatuh, semangat Berdikari agak surut karena Orde Baru lebih pragmatis bekerjasama dengan Barat. Namun, gagasan kemandirian nasional tetap tertanam dalam sanubari bangsa hingga kini sebagai cita-cita ideal (misal istilah “berdikari” masih sering dipakai untuk dorong UMKM). Kesamaan utamanya, baik Iran maupun Indonesia mengakui ketahanan ideologis memacu keberanian untuk mandiri. Ideologi memberi rakyat alasan moril untuk menerima beban swasembada (yang kadang berat di awal) demi kebebasan jangka panjang.

b. Kepemimpinan Spiritual-Militer Khamenei: Ayatollah Khamenei merepresentasikan model pemimpin filosof-raja (*philosopher king*) versi modern: seorang pemimpin agama yang juga memegang kendali politik dan militer. Dari perspektif teori kepemimpinan, hal ini jarang ditemui di negara lain kecuali Vatikan (Paus) tetapi Paus tidak punya tentara nasional. Khamenei unik karena ia bukan militer karier, namun jabatannya memberinya otoritas untuk mengkomando jenderal-jenderal profesional. Ia menjabat Komandan Tertinggi seluruh angkatan, termasuk IRGC, dan segala keputusan besar pertahanan membutuhkan persetujuannya. Dalam praktik, Khamenei kerap memberi arahan strategis melalui rapat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) yang ia pimpin. Misalnya, keputusan Iran bernegosiasi terkait nuklir (hingga tercapai JCPOA 2015) tidak lepas dari *green light* Khamenei, begitu pula keputusan meningkatkan kembali pengayaan uranium pasca keluarnya AS dari kesepakatan (2018) adalah instruksi darinya.

Sebagai pemimpin spiritual, Khamenei juga menjaga moral dan ideologi pasukan. Ia rutin berpidato di hadapan taruna militer, pasukan IRGC, keluarga martir, dll., menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan kebangsaan. Konsep jihad pertahanan sering ia ulang: setiap prajurit Iran dianalogikan dengan prajurit Imam Hussein di Karbala yang harus siap berkorban demi kebenaran. Ia juga menekankan prinsip *tawakal* (berserah pada Tuhan) sembari memaksimalkan ikhtiar militer, sehingga prajurit merasa mendapatkan restu ilahi. Efeknya, moral pasukan cenderung tinggi karena yakin berperang di jalan benar. Bahkan saat Jenderal Qassem Soleimani tewas dibunuh AS (2020), Khamenei secara personal memimpin salat jenazah dan menyatakan darah Soleimani “tidak akan sia-sia” memicu gelombang emosi nasional yang

meningkatkan dukungan publik pada aksi balasan Iran. Hal-hal tersebut menunjukkan *blending* peran agama dan militer dalam sosok Khamenei.

Dari sisi kebijakan militer, Khamenei terlibat mendetail. Contoh nyata: operasi Iran melawan ISIS dan kelompok teroris di Irak-Suriah (2014-2017). Khamenei memberikan *restu fatwa* untuk mengerahkan Pasukan Quds IRGC ke Suriah, dengan dalih membela situs suci Syiah dan membantu sesama Muslim melawan terorisme. Narasi “*Defenders of the Shrine*” bukan hanya retorika; Khamenei secara pribadi menyebut para sukarelawan yang gugur di Suriah sebagai pahlawan iman. Ia menegaskan pembelaan makam suci sebenarnya adalah pembelaan atas “prinsip kemanusiaan dan kebenaran” melawan tirani (yang direpresentasikan ISIS dan pendukungnya). Dengan demikian, keputusan geostrategis (terlibat di perang Suriah) dibingkai dalam konteks ideologis global (pertarungan melawan kezaliman, membela kaum tertindas), sehingga mendapatkan dukungan luas di dalam negeri. Berkat dukungan itu, Iran mampu mengerahkan ribuan personel dan sumber daya ke luar negeri tanpa gejolak domestik berarti. Ini kontras dengan Amerika Serikat misalnya, di mana keterlibatan perang luar negeri kerap ditentang publik bila korban meningkat.

Di Indonesia, integrasi kepemimpinan sipil-militer tidak bersifat pribadi, melainkan kolektif melalui prinsip kemanungan TNI-Rakyat. Presiden sebagai pemimpin sipil tertinggi memang memegang kendali militer, tetapi ia harus membangun legitimasi melalui kinerja dan nilai Pancasila, bukan melalui klaim religius. Namun, Indonesia punya pengalaman manis ketika pemimpin nasional mampu menginspirasi militer dan rakyat lewat visi ideologis. Misalnya, Presiden Soekarno dengan Pidato “Pantja Sila” 1 Juni 1945 dan orasi-orasinya saat Revolusi menggelorakan semangat TNI dan laskar rakyat. Jenderal Sudirman pun sangat menghormati Soekarno sebagai simbol republik, meski dalam beberapa hal berbeda pendapat, keduanya bersatu saat berhadapan dengan Belanda. Pada era modern, nilai-nilai spiritual tentu masih penting bagi prajurit (kebanyakan TNI beragama Islam atau lainnya yang taat), tapi tidak dijadikan agenda resmi pertahanan. Sebagai gantinya, doktrin TNI menekankan nilai humanisme Pancasila: prajurit berjuang demi kemanusiaan dan persatuan, bukan perrusuhan sektarian. Ada adagium “TNI kuat bersama rakyat”, sejalan dengan ajaran Khamenei bahwa militer kuat karena didukung rakyat beriman. Bedanya, Khamenei mengaku memperkuat iman dengan ideologi agama, sedangkan TNI memperkuat hubungan dengan rakyat melalui pengabdian (misal operasi bakti TNI, program serbuan teritorial).

Inti persamaan yang bisa dipetik: Integrasi visi ideologis dengan strategi militer sangat vital agar seluruh komponen bangsa kompak menghadapi ancaman. Iran telah membuktikan bahwa militer yang diideologisasi (dalam artian positif: diberi arah moral) cenderung lebih solid dan gigih. Indonesia pun mengakui hal itu; karenanya Pancasila dan Saptama Marga dijadikan roh bagi profesionalisme TNI. Perbedaannya terletak pada substansi ideologi (Islam vs Pancasila) dan mekanisme (pimpinan tunggal vs kolektif). Namun keduanya sama-sama mencerminkan pertahanan yang berakar pada keyakinan fundamental bangsa.

c. Sumber Daya Terbatas dan Inovasi Iran: Iran diberkahi sumber daya alam melimpah (cadangan minyak dan gas termasuk terbesar dunia). Ironisnya, sanksi membuat akses Iran terhadap pasar dan teknologi global dibatasi. Ini menciptakan paradoks: kaya SDA tapi miskin akses. Di sinilah kreativitas domestik ditempa. Khamenei sering menyerukan “*kendiri*” (mandiri) dalam sains dan teknologi. Salah satu inisiatif adalah mendorong generasi muda dan kaum terdidik untuk berkontribusi lewat berbagai gerakan sains. Misalnya, organisasi Basij memiliki

sayap mahasiswa dan pelajar yang dilibatkan dalam proyek penelitian strategis. Pemerintah Iran juga menggelar kontes inovasi, olimpiade sains, hingga mendirikan kawasan teknologi seperti *Iran Silicon* di Teheran untuk menampung startup lokal. Akibat isolasi, banyak ilmuwan Iran yang biasanya mungkin akan bekerja di luar negeri terpaksa berkarya di dalam negeri hal ini justru meningkatkan kapasitas internal. Khamenei mencatat, “*Our youth made certain achievements that would have been impossible in the absence of the sanctions*”english.khamenei.ir. Contohnya, Iran berhasil menemukan sumber-sumber uranium baru di dalam negeri dan mengembangkan centrifuge nuklir sendiri, padahal teknologi ini sangat kompleks dan biasanya diperoleh melalui kolaborasi internasional.

Dalam industri pertahanan, keterbatasan impor mendorong modifikasi inovatif. Saat Iran tak bisa membeli tank modern, mereka mengambil sasis tank tua (seperti T-55/T-72 era Shah) lalu *upgrade* dengan teknologi lokal jadi varian baru (misal Tank Zulfiqar hasil kombinasi teknologi beberapa tank). Untuk pesawat tempur, Iran mengkanibal suku cadang dari berbagai pesawat tua demi mempertahankan armada F-14, F-4 yang embargo suku cadangnya. Bahkan lahir solusi tidak lazim: memodifikasi pelatih jet menjadi pesawat tempur ringan (Kowsar). Drone adalah area Iran memanfaatkan *asymmetric innovation*: dibanding mahal membeli jet, mereka buat drone murah berpuluhan-puluhan unit. Keuntungan drone: biaya rendah, tidak berisiko pilot tewas, tapi dampak strategis besar contohnya penggunaan drone Iran di medan perang mengundang perhatian dunia karena efektif dan sulit ditangkal.

Semua itu menunjukkan sanksi memaksa Iran berinovasi *out of the box*. Prinsip “*necessity is the mother of invention*” berlaku. Di pabrik-pabrik Iran, terdapat slogan motivasi bahwa embargo adalah ujian kemandirian, bukan alasan kegagalan. Selain itu, pemerintah menggulirkan program *Jihad Ilmiah* yang memberikan insentif bagi riset di universitas untuk teknologi substitusi impor. Hasilnya, Iran mengalami lompatan di beberapa bidang sains: peringkat publikasi ilmiah Iran meningkat pesat (sempat peringkat 16 dunia dalam nanoteknologi). Walaupun tak semua inovasi langsung sukses (banyak prototipe senjata diejek kualitasnya di awal), lambat laun Iran membuktikan mampu menghasilkan produk mumpuni. Shahed-136 misalnya, awalnya diremehkan, kini menjadi ancaman nyata di konflik Ukraina karena memaksa lawan menghabiskan pertahanan udara mahal untuk menembak drone murahan.

Beralih ke Indonesia, suasanya berbeda: Indonesia tidak dikenai sanksi internasional, sehingga bisa impor alutsista. Namun Indonesia pernah mengalami hambatan mirip sanksi, misalnya embargo senjata tahun 1999-2005. Pasca insiden Timor Timur 1999, AS dan Uni Eropa menghentikan penjualan senjata serta kerja sama militer dengan Indonesia. Akibatnya, banyak pesawat tempur TNI AU tidak bisa terbang karena suku cadang (buatan AS) diblokir, kapal perang kekurangan suku cadang Eropa, dsb. Kondisi ini menyadarkan Indonesia akan pentingnya kemandirian industri pertahanan. Pemerintah lalu mulai menghidupkan kembali PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi senjata sendiri, atau paling tidak merakit hasil alih teknologi. Contoh, karena tak bisa beli senapan serbu dari Amerika, TNI akhirnya memesan ke Pindad (lahirnya senapan SS1/SS2). Demikian pula, PT Pindad mengembangkan panser Anoa karena akses beli panser modern agak sulit kala itu. Pelajaran dari embargo 1999 itu sejalan dengan pengalaman Iran: andalkan kekuatan sendiri agar pertahanan tidak lumpuh saat pasokan luar terhenti.

Kini, meski embargo telah dicabut, Indonesia tetap melanjutkan tekad kemandirian alutsista dengan target *Minimum Essential Force*. Tantangannya, karena tak diembargo, godaan impor selalu ada. Berbeda dengan Iran yang terpaksa mandiri, Indonesia harus sukarela membatasi ketergantungan. Di sinilah peran ideologi Pancasila sebenarnya dapat menjadi motivator halus: Sila ke-5 (Keadilan Sosial) dan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan penguasaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Maknanya, Indonesia secara moral diharuskan menguasai teknologi vital demi kedaulatan ekonomi dan pertahanan, bukan terus bergantung impor yang justru menguntungkan asing. Jika ide ini disosialisasikan, publik bisa mendukung anggaran riset pertahanan lebih besar. Pemerintah sudah menunjukkan langkah seperti belanja alutsista diimbangi *TOT* (*transfer of technology*). Misal, beli kapal perang harus bangun di galangan dalam negeri (kerja sama PT PAL dengan Damen Belanda). Pendekatan ini analog dengan Iran yang mengikat mitra dagang non-Barat agar alih teknologi (Iran banyak kerjasama militer dengan Korea Utara, China, dll.).

Singkatnya, kendala sumber daya eksternal dapat diatasi dengan inovasi internal bila didorong semangat ideologis. Iran memanfaatkan ideologi religi-nasionalismenya untuk *boost* kemandirian. Indonesia punya modal ideologi Pancasila dan kenangan Berdikari Soekarno yang bisa diaktualisasikan untuk tujuan sama. Ketika pejabat dan rakyat kompak bersikap: "lebih baik susah di awal tapi mandiri, daripada mudah tapi tergantung", di situlah ketahanan nasional tumbuh.

d. Perbandingan Prinsip Kejuangan dan Ideologi: Motto perjuangan seringkali mencerminkan jiwa pertahanan suatu bangsa. Iran dan Indonesia punya motto yang mirip spiritnya. Di Iran, terutama kalangan revolusioner, dikenal slogan "Hidup Mulia atau Mati Syahid" (*Marg bar zendegi bi-ezzat, ya shahadat ya azadat* dalam bahasa Persia). Artinya, mereka memilih mati sebagai syahid (martir) daripada hidup hina tunduk pada musuh. Slogan ini kuat selama Perang Iran-Irak (1980-1988). Banyak pemuda Iran bergabung ke Basij (milisi sukarelawan) dan dengan berani melakukan misi-misi nekat, seperti "*human wave*" melintasi ladang ranjau, karena dorongan ideologi syahid. Bagi mereka, gugur di medan perang akan langsung masuk surga dan dikenang mulia. Nilai martir ini ditanamkan melalui pendidikan dan media; misal buku harian remaja syahid (seperti "*Mahdi Zeinuddin*") dijadikan bacaan populer. Hasilnya, Iran mampu mempertahankan wilayahnya walau harus kehilangan ratusan ribu nyawa karena secara kolektif rakyatnya menerima pengorbanan itu sebagai keniscayaan.

Indonesia pada masa Revolusi Fisik 1945-49 punya padanan motto: "Merdeka atau Mati". Pidato Bung Tomo pada 10 November 1945 di Surabaya mengobarkan, "Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap: Merdeka atau Mati!". Ini bukan sekadar slogan; para pejuang dari berbagai daerah bersatu di Surabaya melawan tentara Sekutu, banyak yang gugur, namun pertempuran itu dikenang sebagai Hari Pahlawan dan simbol perlawanan mati-matian bangsa. Merdeka atau Mati menjadi ethos TNI dan laskar di berbagai front perang kemerdekaan. Nilai ini pula yang membuat perang gerilya tetap menyala meski ibu kota jatuh (Yogyakarta 1948). Dalam Sumpah Prajurit TNI yang dirumuskan kemudian, tersirat tekad rela mati demi keutuhan NKRI.

Namun, perlu dicatat situasi setelah kemerdekaan: Indonesia tidak terus-menerus dalam ancaman eksistensial seperti Iran (yang selalu bermusuhan dengan AS-Israel). Selepas agresi militer Belanda berakhir 1949, Indonesia relatif damai dari invasi asing, sehingga tensi "hidup-mati" menurun. Tantangan kemudian bergeser ke ancaman internal (pemberontakan

PRRI/PERMESTA, G30S) dan ancaman abstrak (kemiskinan, ketertinggalan). Pemerintah Orde Baru membingkai ancaman komunisme sedemikian rupa sehingga Pancasila menjadi tameng ideologis ada istilah “mati di atas runtuhan Pancasila” yang mengisyaratkan TNI akan berjuang sampai mati melawan ideologi komunis demi mempertahankan Pancasila. Nilai *kejuangan* 45 dipupuk terus melalui upacara, monumen, film (contoh film “Enam Jam di Yogyakarta”, “Serangan Fajar” yang heroik). Sementara di Iran, karena konflik dengan luar terus berlanjut (dari perang Iran-Irak, kemudian ketegangan dengan AS/Israel, perang proksi di Suriah dsb.), narasi “hidup mulia atau mati syahid” tetap relevan hingga kini. Contohnya, saat konfrontasi Iran-Israel memuncak baru-baru ini, ada poster-poster di Teheran bertuliskan semangat jihad melawan Zionis, mengajak pemuda siap syahid demi Al-Quds. Semangat itu diwariskan lintas generasi.

Meski perbedaan konteks, nilai kejuangan inti sama: rela berkorban demi tanah air dan keyakinan. TNI hingga kini mengajarkan “jiwa korps, militansi, dan kerelaan berkorban”. Doktrin Pertahanan Negara Indonesia menempatkan kesiapan seluruh warga ikut berperang bila negara terancam (pasal kewajiban Bela Negara UUD 1945). Ini mirip konsep “mobilisasi massal” di Iran jika diserang musuh. Bahkan, konsep Komponen Cadangan yang dibentuk Indonesia belakangan ini sejatinya terinspirasi dari model pertahanan semesta yang juga ada padannya di Iran berupa “perlawanan rakyat” jika Iran diserbu (Iran melatih Basij jutaan orang untuk perang gerilya jika diserang). Jadi, *will* bangsa untuk berjuang habis-habisan sangat dipengaruhi ideologi yang tertanam.

Pancasila sebagai ideologi negara memberi landasan cinta tanah air (nasionalisme), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan – semua ini kalau diintegrasikan ke jiwa prajurit, akan menghasilkan profil Prajurit TNI yang Tangguh dan Humanis. Nilai patriotisme Pancasila pun mendorong prajurit untuk tidak sekadar berani mati, tetapi juga tidak semena-mena terhadap rakyat (ingat Sumpah Prajurit memuat pembelaan terhadap rakyat dan pantang menodai kehormatan wanita dsb., berbeda dengan militer yang hanya menekankan jihad perang semata). Ini perbedaan halus: ideologi Iran memuliakan mati syahid, ideologi Indonesia memuliakan keberanian sekaligus peri kemanusiaan. Kedua bangsa menghormati pahlawan yang gugur (Iran punya Hari Martir, Indonesia Hari Pahlawan), menunjukkan collective memory pengorbanan dipelihara untuk pendidikan generasi selanjutnya.

e. Implikasi bagi Doktrin Pertahanan Indonesia: Belajar dari kasus Iran di bawah Khamenei, jelas bahwa doktrin pertahanan yang kuat tidak hanya bertumpu pada senjata dan jumlah pasukan, tetapi juga pada kekuatan ideologi bangsa. Iran berhasil bertahan dari tekanan multi-dimensi karena rakyat dan militernya memiliki *ideological will* yang keras. Bagi Indonesia, ini mengandung pesan bahwa pembangunan postur pertahanan harus seimbang antara kekuatan fisik (*hard power*) dan kekuatan ideologis (*soft power*). Beberapa implikasi konkret untuk Indonesia:

- 1) Penguatan Pendidikan Ideologi: Kurikulum pendidikan militer (Akademi TNI, Sekapa, dll.) perlu terus menekankan sejarah perjuangan bangsa dan nilai Pancasila dalam konteks kekinian. Demikian pula, program Bela Negara bagi warga sipil harus digiatkan dengan materi yang relevan (misal bahaya *proxy war*, pentingnya persatuan). Tujuannya menanamkan nasionalisme militer yang rasional cinta tanah air tanpa menjadi *chauvinistic*. Khamenei berhasil membuat rakyatnya tahan menderita demi negara; Indonesia perlu memastikan rakyat dan prajuritnya juga teguh jika suatu saat harus menghadapi situasi sulit demi kedaulatan.

- 2) Keteladanan dan *Trust Leadership*: Pemimpin nasional Indonesia di era modern tentu tidak berperan sebagai ulama yang mengeluarkan fatwa, tetapi mereka bisa mengambil peran sebagai figur pemersatu yang memberikan teladan integritas. Salah satu tantangan di Indonesia adalah sinisme publik jika melihat elite korup atau egois, yang bisa menggerus kepercayaan pada negara. Iran relatif berhasil menjaga dukungan internal karena meski ada isu korupsi simbol Pemimpin Tertinggi dijaga sacral (hampir tak tersentuh kritik). Indonesia negara demokrasi terbuka, tapi pemimpin bisa mencontoh aspek *walk the talk*: misalnya hidup sederhana, tegas terhadap asing, dll., sehingga rakyat merasa dipimpin orang yang sevisi dalam ideologi. Dengan demikian, ketika pemimpin mengajak rakyat berkorban pun (misal: patuh pembatasan ekonomi demi embargo terhadap musuh), rakyat lebih mau mengikuti.
- 3) Integrasi Pancasila dalam Operasi dan Kebijakan Pertahanan: Setiap kebijakan pertahanan sebaiknya dilandasi nilai Pancasila. Misal, dalam operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanganan bencana, TNI harus menunjukkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab hal ini sudah sering dilakukan TNI saat bencana dengan sigap menolong korban tanpa diskriminasi. Dalam operasi pengamanan daerah konflik dalam negeri, pendekatan "*heart and minds*" diutamakan, mencerminkan sila Persatuan Indonesia (merangkul semua komponen) dan sila Keadilan Sosial (mengatasi akar ketidakadilan supaya konflik reda). Pola ini akan membedakan pertahanan Indonesia dari model hegemonik atau represif. Jika militer negara lain cenderung keras, militer Indonesia justru humanis dan merangkul ini sejatinya kekuatan, bukan kelemahan, karena dukungan rakyat semakin kuat. Kelebihan ini selaras dengan semangat Pertahanan Rakyat Semesta yang melibatkan rakyat sebagai pusat pertahanan.
- 4) Kemandirian Pertahanan sebagai Mandat Ideologis: Seperti diuraikan sebelumnya, kemandirian alutsista wajib hukumnya bagi Indonesia jika ingin berdaulat. Untuk itu, perlu strategi jangka panjang: investasi di riset, galakan BUMN Strategis, kemitraan internasional yang saling menguntungkan (bukan tergantung satu pihak). Pembudayaan inovasi teknologi harus dimulai di level pendidikan (dorong anak muda di STEM) dan didukung kebijakan (anggaran litbang diperbesar). Landasan moralnya sudah ada di Pancasila (Keadilan Sosial rakyat berhak atas keamanan yang dijamin alutsista buatan sendiri, misalnya). Dengan menjadikan ini sebagai *national mission*, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan iptek pertahanan. Hal ini meneladani Iran yang menjadikan swasembada militer sebagai *legacy Revolusi Islam*.
- 5) Kesiapsiagaan Mental Menghadapi *Proxy War* dan Disinformasi: Ancaman masa kini tak selalu berupa invasi, tapi bisa berupa perang informasi, adu domba, radikalisme. Ketahanan ideologi Pancasila amat diperlukan untuk menyaring pengaruh asing negatif di era media sosial. Generasi muda harus diberi pemahaman mendalam Pancasila sehingga tidak mudah terpecah belah oleh politisasi SARA atau provokasi ideologi transnasional (terorisme global, ekstremisme). Upaya ini memerlukan sinergi antar lembaga Kemhan, Kemendikbud, ormas untuk membumikan Pancasila secara kreatif (misal melalui konten digital, influencer milenial). Jika ini berhasil, efeknya sama dengan di Iran: mayoritas pemuda Iran meski terpapar internet global, masih nasionalis dan tidak pro-Barat karena sudah *inoculated* ideologinya.

Pada akhirnya, visi pertahanan Indonesia yang ideal adalah memiliki karakter unik: keras dalam membela kedaulatan, namun lembut dalam perlakuan kepada rakyat sendiri dan bangsa lain sesuai nilai kemanusiaan. Inilah pengejawantahan Pancasila dalam pertahanan. Model ini bisa menjadi antitesis terhadap model pertahanan hegemonik yang agresif atau model represif yang menindas rakyat. Dengan memegang teguh Pancasila, Indonesia dapat menuju tahun 2045 (satu abad kemerdekaan) sebagai bangsa yang kokoh secara fisik (militer modern, ekonomi kuat) sekaligus tangguh secara ideologis (rakyat bersatu dalam kebhinekaan). Ketahanan ideologi akan menjadi pondasi yang membuat segala upaya pertahanan berkelanjutan, karena didukung penuh oleh seluruh komponen bangsa. Pengalaman Iran mengajarkan bahwa selama rakyat loyal pada ideologi negara, mereka siap berkorban dan bertahan menghadapi situasi seberat apapun. Maka, tugas kita memastikan Pancasila selalu menjadi jiwa dan semangat dalam setiap denyut pertahanan Indonesia.

Kesimpulan

Ayatollah Ali Khamenei telah membuktikan bahwa ideologi yang kuat dapat menjadi fondasi utama ketahanan nasional. Dengan memadukan kepemimpinan spiritual dan militer, Khamenei berhasil mengarahkan Iran mengelola sumber daya yang terbatas untuk tetap bertahan menghadapi tekanan global. Konsep "Ekonomi Resistensi" yang ia gulirkan berbunyi pada meningkatnya kemandirian Iran: pembangunan kilang minyak yang mengurangi ketergantungan impor bensin, peningkatan produksi pangan pokok, serta lompatan teknologi pertahanan seperti pengembangan drone dan misil lokal. Demikian pula, restrukturisasi ekonomi melalui peran IRGC membantu Iran bertahan dari sanksi meski dengan konsekuensi ekonomi internal yang tidak ringan. Khamenei melalui wilayah faqih-nya juga berhasil menjaga semangat perlawanan ideologis rakyat dengan narasi jihad defensif dan penghormatan bagi para syuhada, sehingga rakyat Iran relatif solid mendukung program pertahanan negara.

Bagi Indonesia, meskipun ideologi negara dan konteks ancaman berbeda, esensi yang bisa dipetik sama: kekuatan ideologis merupakan elemen vital dalam doktrin pertahanan. Pancasila beserta nilai juang 45 adalah harta tak benda bangsa yang harus terus dijaga dan diperkuat sebagai perekat nasional. Ancaman masa kini mungkin lebih halus (penetrasi budaya, informasi, ekonomi), namun ideologi Pancasila yang tertanam kuat di dada setiap warga dan prajurit akan menjadi tameng ampuh. Pancasila mengajarkan cinta tanah air, persatuan, dan keadilan nilai-nilai ini jika diinternalisasi aparatur pertahanan, akan melahirkan kekuatan militer yang patriotik sekaligus tidak melupakan perikemanusiaan.

Indonesia perlu secara terencana memperkuat ketahanan ideologi Pancasila. Misalnya melalui pembinaan mental ideologi di kalangan prajurit yang dikombinasikan dengan peningkatan profesionalisme dan disiplin. Dengan begitu, TNI akan memiliki militansi berwawasan berani karena benar dan didukung rakyat. Di level masyarakat, pendidikan karakter Pancasila mesti digalakkan agar generasi muda imun terhadap hasutan memecah belah. Ini semua adalah investasi jangka panjang menuju terciptanya *deterrence* yang utuh: tidak hanya hard power tapi juga willpower bangsa. Pada akhirnya, pertahanan Indonesia akan memiliki ciri khas: tangguh secara fisik maupun ideologis. Kuat menghadapi musuh dari luar, solid menghadapi rongrongan dari dalam, dan selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah. Ciri inilah yang akan menjaga Indonesia selamat dan berjaya menyongsong tahun 2045 dan seterusnya.

Singkat kata, "peluru" bisa menghancurkan satu kepala, tapi ideologi yang kuat bisa menggerakkan jutaan kepala untuk melindungi bangsa. Iran di bawah Khamenei menunjukkan hal itu kepada dunia. Indonesia, dengan caranya sendiri, dapat melakukan hal yang sama dengan menjadikan

Pancasila sebagai roh dalam *State Defense Doctrine*. Dengan demikian, kita dapat memiliki pertahanan nasional yang tidak saja ditakuti lawan, tetapi juga dicintai dan dibanggakan oleh rakyatnya sendiri sebuah kekuatan yang hakiki dan tak ternilai harganya.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2024). *Iran warns it will change nuclear doctrine if 'existence threatened'*. AlJazeera.comaljazeera.com.
- Arms Control Association. (1999). *U.S. and EU Suspend Military Ties With Indonesia*. armscontrol.orgarmscontrol.org.
- Detik News. (2023). *Isi Pidato Bung Tomo 10 November 1945: Merdeka atau Mati!* detik.comdetik.com.
- Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Menhan Ingatkan TNI Pegang Teguh Nilai-Nilai Kejuangan '45*. kemhan.go.idkemhan.go.idkemhan.go.id.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Pelibatan Seluruh Sumber Daya Nasional dalam Pertahanan*. kemhan.go.idkemhan.go.id.
- Khamenei, A. (2018). *Speeches on Sanctions and Self-Sufficiency*. Khamenei.irenglish.khamenei.irenglish.khamenei.ir.
- Morfit, M. (1981). *Pancasila: The Indonesian Ideology*. (Analysis of Pancasila post-1945).
- Rawabet Center. (2025). *Iran's Resistance Economy: A Survival Strategy or a Vicious Cycle?* rawabetcenter.comrawabetcenter.comrawabetcenter.com.
- Times Indonesia. (2020). *Spirit Kelahiran Bung Karno: Berdikari dalam Ekonomi*. timesindonesia.co.idtimesindonesia.co.idtimesindonesia.co.id.
- Tricontinental Institute. (2025). *Revolution vs Integration: Iran's Strategic Turning Points*. thetricontinental.orgthetricontinental.orgthetricontinental.org.
- Orbit Indonesia. (2024). Artikel wawasan pertahanan berlandas Pancasila (diakses dari orbitindonesia.com).
- Iran Press. (2024). *Leader Praises Shrine Defenders, Highlights Islamic Revolution's Global Perspective*. iranpress.comiranpress.comiranpress.com.
- Council on Foreign Relations. (2025). *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)*. cfr.orgcfr.orgcfr.org.
- Jurnal Syntax Admiration. (2025). *Pertahanan dan Keamanan Berlandaskan Prinsip Pancasila bagi Generasi Produktif menuju Indonesia Emas 2045*. jurnalsyntaxadmiration.comjurnalsyntaxadmiration.comjurnalsyntaxadmiration.com.